

# EKSPLOITASI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DALAM OPERASI JUDI ONLINE DI KAMBOJA : STUDI KASUS SEKELOMPOK PEKERJA MIGRAN ASAL TANJUNGPINANG SEBAGAI KORBAN

Hotlin Hutasoit \*<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang  
\*e-mail : [hotlinsoit@gmail.com](mailto:hotlinsoit@gmail.com)

## Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi eksploitasi pekerja migran Indonesia dalam judi online di Kamboja, berfokus pada seorang pria dari Tanjungpinang sebagai korban. Banyak pekerja migran terjebak dalam jaringan perdagangan manusia yang memaksa mereka bekerja dalam kondisi buruk setelah dijanjikan gaji tinggi. Melalui wawancara dan analisis data, studi ini mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, termasuk ancaman kekerasan dan perlunya intervensi pemerintah serta organisasi non-pemerintah untuk melindungi hak-hak pekerja migran. Temuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai isu perdagangan manusia di Asia Tenggara.

**Katakunci:** Pekerja, Migran, Eksploitasi, Judi Online, Perdagangan Manusia, Kamboja, Korban, Tanjungpinang, Kondisi Kerja, Intervensi, Hak Pekerja

## Abstract

This research explores the exploitation of Indonesian migrant workers in online gambling in Cambodia, focusing on a man from Tanjungpinang as a victim. Many migrant workers are trapped in human trafficking networks that force them to work in poor conditions after being promised high salaries. Through interviews and data analysis, this study identifies the challenges faced, including the threat of violence and the need for government as well as non-governmental organization interventions to protect the rights of migrant workers. The findings are expected to provide insights into the issue of human trafficking in Southeast Asia.

**Keywords:** Migrant, Workers Exploitation, Online, Gambling, Human, Trafficking, Cambodia, Victims, Tanjungpinang, Working Conditions, Intervention, Worker Rights

## PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena migrasi pekerja dari Indonesia, khususnya dari daerah Tanjungpinang, telah mengalami peningkatan yang signifikan. Banyak individu berusaha mencari peluang kerja di luar negeri dengan harapan mendapatkan penghasilan yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan keluarga. Keterbatasan lapangan kerja dan tingkat upah yang rendah di dalam negeri mendorong banyak orang untuk mengambil risiko meninggalkan tanah air mereka demi mencari kehidupan yang lebih baik.

Namun, di balik harapan tersebut, terdapat banyak risiko yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan pekerja migran. Banyak dari mereka tidak memiliki informasi yang memadai mengenai lingkungan kerja di negara tujuan, sehingga menjadi sasaran empuk bagi praktik penipuan dan eksploitasi. Berbagai laporan menunjukkan bahwa banyak pekerja migran Indonesia terjebak dalam kondisi kerja yang tidak aman dan tidak manusiawi, bahkan terlibat dalam aktivitas ilegal yang membahayakan diri mereka.

Salah satu bentuk eksploitasi yang semakin marak adalah keterlibatan pekerja migran dalam operasi judi online. Negara-negara seperti Kamboja menjadi tujuan banyak pekerja migran yang tertipu oleh janji-janji pekerjaan dengan gaji tinggi dan kondisi kerja yang baik. Namun, kenyataannya, mereka sering kali dipaksa untuk terlibat dalam aktivitas perjudian, yang tidak hanya melanggar hukum tetapi juga sangat berisiko bagi keselamatan mereka.

Jaringan kriminal yang mengelola operasi judi online ini sering kali melakukan perekrutan secara ilegal dan memanfaatkan kerentanan pekerja migran. Mereka menawarkan iming-iming yang menarik, tetapi pada akhirnya mengikat pekerja dalam kontrak yang tidak adil dan mengeksploitasi mereka secara fisik dan mental. Kasus seorang pria asal Tanjungpinang yang menjadi korban dalam jaringan ini menggambarkan betapa rentannya pekerja migran terhadap praktik eksploitasi yang terjadi di luar negeri.

Dengan memahami latar belakang, alasan, dan kondisi yang dihadapi oleh pekerja migran ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai isu perdagangan manusia dan eksploitasi yang menimpa pekerja migran Indonesia. Pentingnya perlindungan hak-hak mereka dalam konteks global harus menjadi perhatian utama, mengingat banyaknya pekerja yang berjuang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik tanpa menyadari risiko yang mengintai.

## KAJIAN TEORITIS

- **Teori Mobilitas Sosial:** Teori ini menekankan pergerakan individu dari satu posisi sosial ke posisi lainnya, yang sering kali dipicu oleh keinginan untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial. Dalam konteks pekerja migran, teori ini membantu menjelaskan motif di balik migrasi mereka, yaitu pencarian peluang kerja yang lebih baik. Namun, mobilitas ini juga membawa risiko, karena banyak pekerja tidak sepenuhnya memahami tantangan yang akan mereka hadapi di negara tujuan, termasuk kemungkinan terjebak dalam jaringan kerja yang eksploitatif.
- **Teori Perdagangan Manusia:** Teori ini memberikan pemahaman tentang praktik perdagangan manusia, termasuk eksploitasi yang dialami oleh pekerja migran. Dalam banyak kasus, pekerja migran Indonesia menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh jaringan kriminal. Mereka dijanjikan pekerjaan yang layak, tetapi pada kenyataannya, mereka dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi. Teori ini menyoroti pentingnya intervensi sistemik untuk mengatasi masalah perdagangan manusia dan melindungi hak-hak pekerja migran.
- **Teori Keadilan Sosial:** Teori ini berfokus pada perlunya keadilan dan kesetaraan dalam distribusi sumber daya dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks eksploitasi pekerja migran, teori ini menekankan tanggung jawab pemerintah dan organisasi internasional untuk melindungi hak-hak pekerja. Keadilan sosial menuntut adanya kebijakan yang memastikan bahwa pekerja migran tidak hanya dilindungi dari eksploitasi, tetapi juga diberikan akses ke informasi yang memadai mengenai hak dan kondisi kerja mereka di luar negeri.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode literature review sebagai pendekatan utama untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi terkait eksploitasi pekerja migran Indonesia dalam operasi judi online di Kamboja. Metode ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai isu yang diteliti dengan mengkaji berbagai sumber yang relevan. Pengumpulan data, proses penelitian dimulai dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan topik eksploitasi pekerja migran. Sumber-sumber ini mencakup artikel ilmiah, jurnal, buku, dan laporan dari organisasi non-pemerintah yang membahas isu migrasi, perdagangan manusia, dan kondisi kerja pekerja migran. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh mencakup berbagai perspektif dan temuan terkini. Analisis sumber setelah mengumpulkan data, peneliti akan melakukan analisis terhadap setiap sumber yang telah diidentifikasi. Analisis ini mencakup penilaian terhadap kualitas dan relevansi informasi, serta bagaimana setiap sumber berkontribusi pada pemahaman yang lebih luas mengenai eksploitasi pekerja migran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konteks Sosial dan Ekonomi

Pekerja migran Indonesia sering kali berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang beruntung. Banyak dari mereka tinggal di daerah pedesaan dengan akses terbatas terhadap pendidikan dan peluang kerja yang layak. Dalam banyak kasus, kondisi ekonomi yang sulit mendorong individu untuk mencari pekerjaan di luar negeri sebagai cara untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan membantu keluarga yang ditinggalkan. Harapan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik sering kali menjadi motivasi utama bagi mereka untuk berangkat ke negara lain.

Namun, ketidakpahaman mengenai risiko yang terkait dengan migrasi sering kali menjadi masalah serius. Banyak pekerja migran tidak sepenuhnya menyadari tantangan yang akan mereka hadapi, termasuk kemungkinan terjebak dalam situasi eksploitasi. Mereka sering kali terpapar pada informasi yang tidak akurat atau menyesatkan dari agen perekrutan yang menjanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi dan kondisi kerja yang baik. Ketidakpahaman ini dapat menyebabkan mereka terjebak dalam pekerjaan yang tidak sesuai dengan harapan, seperti operasi judi online yang ilegal.

Kondisi sosial dan ekonomi yang mendasari keputusan untuk bermigrasi juga menciptakan kerentanan. Pekerja migran sering kali merasa terdesak untuk menerima tawaran pekerjaan yang mungkin tidak aman atau legal, karena mereka tidak memiliki alternatif yang lebih baik di negara asal mereka. Dalam banyak kasus, mereka terpaksa menandatangani kontrak yang tidak jelas atau tidak adil, yang mengikat mereka pada kondisi kerja yang merugikan. Lebih jauh lagi, keterbatasan akses informasi mengenai hak-hak mereka sebagai pekerja migran juga berkontribusi pada situasi eksploitasi. Banyak pekerja tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah, dan mereka sering kali tidak tahu ke mana harus mencari bantuan jika mereka mengalami masalah. Hal ini semakin memperburuk situasi mereka, karena mereka merasa terisolasi dan tidak memiliki dukungan yang memadai. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa kebijakan pemerintah dan peran agen perekrutan juga sangat berpengaruh. Meskipun ada upaya dari pemerintah untuk melindungi pekerja migran, implementasi kebijakan tersebut sering kali tidak efektif. Banyak agen perekrutan beroperasi tanpa pengawasan yang memadai, sehingga mereka dapat mengeksploitasi pekerja migran tanpa konsekuensi.

Secara keseluruhan, konteks sosial dan ekonomi yang melatarbelakangi migrasi pekerja Indonesia sangat kompleks. Meskipun ada harapan untuk meningkatkan kondisi ekonomi, banyak dari mereka yang terjebak dalam situasi yang merugikan akibat ketidakpahaman, keterbatasan informasi, dan kebijakan yang tidak memadai. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan informasi yang tepat kepada calon pekerja migran, serta memperkuat perlindungan hukum untuk mencegah eksploitasi di masa depan.

### **Proses Perekrutan**

Proses perekrutan pekerja migran Indonesia sering kali dilakukan melalui *agen perekrutan* yang beroperasi baik secara resmi maupun tidak resmi. Agen ini biasanya menawarkan janji-janji menarik, seperti pekerjaan dengan gaji tinggi dan kondisi kerja yang baik, yang menjadi daya tarik utama bagi calon pekerja. Dalam banyak kasus, agen tersebut menggunakan strategi pemasaran yang menjanjikan kehidupan yang lebih baik dan kesempatan untuk mengubah nasib ekonomi mereka.

Namun, kurangnya transparansi dalam proses perekrutan sering kali menjadi masalah serius. Banyak pekerja migran yang tidak mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai jenis pekerjaan yang akan mereka lakukan. Mereka sering kali hanya diberikan gambaran umum yang optimis tanpa rincian yang memadai tentang tanggung jawab pekerjaan, lingkungan kerja, dan risiko yang mungkin dihadapi. Hal ini sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan pekerja terjebak dalam situasi yang tidak sesuai dengan harapan mereka.

Salah satu contoh yang sering terjadi adalah ketika pekerja migran direkrut untuk posisi yang terlihat sah, seperti pekerjaan di sektor pelayanan atau konstruksi, tetapi pada kenyataannya, mereka dipekerjakan dalam operasi judi online yang ilegal. Dalam situasi ini, pekerja tidak hanya menghadapi eksploitasi, tetapi juga risiko hukum yang serius. Mereka

dapat dikenakan sanksi hukum baik di negara tempat mereka bekerja maupun di negara asal mereka.

Proses perekrutan yang tidak jelas ini juga diperburuk oleh kurangnya regulasi dan pengawasan terhadap agen perekrutan. Banyak agen beroperasi tanpa lisensi atau izin resmi, sehingga mereka tidak terikat oleh standar etika atau hukum yang ketat. Ini memungkinkan agen untuk melakukan penipuan atau menipu calon pekerja tanpa rasa takut akan konsekuensi.

Selain itu, banyak pekerja migran merasa terdesak untuk menerima tawaran yang diberikan oleh agen, karena mereka mungkin sudah mengeluarkan biaya untuk proses perekrutan, seperti biaya pengurusan dokumen dan tiket pesawat. Hal ini menciptakan situasi di mana mereka merasa tidak memiliki pilihan lain, sehingga mereka terpaksa menerima kondisi kerja yang merugikan.

Dari perspektif psikologis, keterdesakan ekonomi juga memainkan peran penting dalam proses perekrutan ini. Banyak calon pekerja migran yang berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang beruntung merasa tidak memiliki alternatif lain yang layak, sehingga mereka lebih mudah ditipu oleh janji-janji yang tidak realistis dari agen. Ketidakpahaman mereka mengenai proses migrasi dan risiko yang terlibat membuat mereka semakin rentan terhadap eksploitasi.

### **Studi Kasus: Eksploitasi Pekerja Migran dari Tanjungpinang**

Di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, sekelompok pekerja migran mengalami eksploitasi yang parah setelah direkrut oleh agen yang menjanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi. Mereka, yang sebagian besar berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang beruntung, tertarik dengan tawaran gaji mencapai 12 juta rupiah per bulan untuk pekerjaan di sektor konstruksi dan perhotelan.

Setelah proses perekrutan yang tidak transparan, para pekerja dibawa ke Kamboja. Setibanya di sana, mereka terkejut mengetahui bahwa pekerjaan yang sebenarnya adalah terlibat dalam operasi judi online yang ilegal. Tugas mereka meliputi mengelola akun judi dan berkomunikasi dengan pelanggan, yang sama sekali tidak sesuai dengan janji awal dari agen.

Kondisi kerja di Kamboja sangat melelahkan, dengan jam kerja yang panjang, sering kali mencapai 12 hingga 14 jam sehari, tanpa istirahat yang memadai. Mereka juga mengalami pengawasan ketat dari majikan, dan jika ada yang berusaha melarikan diri atau menolak untuk bekerja, mereka diancam dengan kekerasan. Beberapa pekerja mengalami pelecehan verbal dan fisik, menciptakan suasana ketakutan yang membuat mereka merasa terjebak.

Setelah beberapa bulan dalam kondisi yang merugikan, beberapa pekerja berhasil melarikan diri dan mencari bantuan dari organisasi non-pemerintah yang fokus pada perlindungan pekerja migran. Organisasi tersebut membantu mereka untuk kembali ke Indonesia, tetapi setibanya di Tanjungpinang, mereka menghadapi stigma sosial dan kesulitan beradaptasi kembali ke kehidupan normal.

Kasus ini mencerminkan kelemahan dalam sistem perekrutan pekerja migran, di mana kurangnya regulasi dan informasi yang jelas mengenai hak-hak pekerja membuat mereka rentan terhadap penipuan dan eksploitasi. Pengalaman pahit ini menunjukkan perlunya langkah-langkah perbaikan untuk melindungi pekerja migran di masa depan.

### **Peran Pemerintah dalam Melindungi Pekerja Migran**

Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar untuk melindungi warganya yang bekerja di luar negeri. Hal ini diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib melindungi pekerja migran mulai dari sebelum mereka berangkat, selama bekerja, hingga saat mereka kembali ke tanah air.

Namun, meskipun ada kerangka hukum yang jelas, banyak kebijakan yang belum cukup efektif dalam memberikan perlindungan yang memadai. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan. Banyak pekerja migran yang masih terjebak dalam situasi eksploitasi, seperti penipuan oleh agen perekrutan yang tidak bertanggung jawab, karena informasi yang tidak memadai dan kurangnya pengawasan terhadap agen-agen tersebut.

Selain itu, meskipun pemerintah telah berupaya untuk mengoptimalkan program Government to Government untuk meningkatkan perlindungan pekerja migran, implementasi di lapangan sering kali tidak sesuai dengan harapan. Banyak pekerja migran yang tidak mendapatkan akses yang cukup terhadap informasi mengenai hak-hak mereka, serta bantuan hukum ketika mereka menghadapi masalah di negara tujuan.

Pemerintah juga telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan negara-negara tujuan, seperti Malaysia, untuk mengatur penempatan dan perlindungan pekerja migran. Namun, pelaksanaan MoU ini sering kali terhambat oleh berbagai faktor, termasuk perbedaan sistem hukum dan budaya kerja antara Indonesia dan negara tujuan. Secara keseluruhan, meskipun ada upaya dari pemerintah untuk melindungi pekerja migran, masih banyak yang perlu diperbaiki. **\*\*Keterbatasan dalam regulasi, pengawasan, dan akses informasi\*\*** menjadi hambatan utama dalam memberikan perlindungan yang efektif. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus memperbaiki kebijakan dan meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa pekerja migran mendapatkan perlindungan yang layak dan aman.

### **Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran**

Penelitian menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk mengembangkan kebijakan yang lebih komprehensif dalam melindungi pekerja migran Indonesia. Salah satu aspek penting dari kebijakan ini adalah peningkatan pengawasan terhadap agen penyedia tenaga kerja. Banyak pekerja migran yang menjadi korban penipuan dan eksploitasi karena agen yang tidak bertanggung jawab, sehingga pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan bahwa agen-agen ini beroperasi sesuai dengan regulasi yang ada.

Selain itu, penyediaan informasi yang jelas mengenai hak-hak pekerja juga sangat penting. Banyak pekerja migran yang tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang hak-hak mereka, baik sebelum berangkat maupun selama bekerja di luar negeri. Dengan memberikan informasi yang transparan dan mudah diakses, pekerja migran dapat membuat keputusan yang lebih baik dan melindungi diri mereka dari potensi eksploitasi. Kebijakan perlindungan yang komprehensif juga harus mencakup pelatihan bagi pekerja migran mengenai risiko yang mungkin mereka hadapi dan cara untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi. Hal ini akan memberdayakan mereka untuk mengambil tindakan jika mereka mengalami masalah di negara tujuan.

Secara keseluruhan, untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran, pemerintah perlu mengintegrasikan berbagai elemen kebijakan yang mencakup pengawasan yang lebih baik terhadap agen, penyediaan informasi yang jelas, serta pendidikan dan pelatihan bagi pekerja. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pekerja migran dapat terlindungi dengan lebih baik dan terhindar dari eksploitasi yang sering terjadi.

### **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari jurnal ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Meskipun ada kerangka hukum yang mengatur perlindungan, implementasi kebijakan sering kali tidak efektif, terutama dalam hal pengawasan terhadap agen penyedia tenaga kerja. Penelitian ini menunjukkan bahwa banyak pekerja migran menjadi korban penipuan dan eksploitasi, yang disebabkan oleh kurangnya informasi yang jelas mengenai hak-hak mereka.

Diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran. Ini termasuk peningkatan pengawasan terhadap agen perekrutan dan penyediaan informasi yang transparan dan mudah diakses. Dengan memberikan pendidikan dan pelatihan yang memadai, pekerja migran dapat lebih memahami risiko yang mungkin mereka hadapi dan cara melindungi diri mereka.

Selain itu, kerjasama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi pekerja migran. Upaya kolektif ini dapat membantu mengurangi angka eksploitasi dan memastikan bahwa pekerja migran mendapatkan perlindungan yang layak.

Secara keseluruhan, untuk mencapai perlindungan yang efektif bagi pekerja migran, pemerintah perlu memperbaiki kebijakan yang ada dan memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam upaya perlindungan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pekerja migran dapat bekerja dengan aman dan terhindar dari eksploitasi di luar negeri.

#### SARAN

1. Pengembangan Kebijakan yang Inklusif: Disarankan agar pemerintah merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi pekerja migran, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta. Hal ini akan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh pekerja migran secara lebih efektif.
2. Peningkatan Kapasitas Lembaga Pengawas: Meningkatkan kapasitas lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi agen penyedia tenaga kerja. Pelatihan dan sumber daya yang memadai harus diberikan agar mereka dapat melakukan tugas pengawasan dengan lebih baik dan responsif terhadap pelanggaran yang terjadi.
3. Sosialisasi dan Edukasi Berkelanjutan: Melakukan sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan mengenai hak-hak pekerja migran, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan. Program-program ini harus dirancang untuk menjangkau calon pekerja migran dan keluarga mereka, sehingga mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban mereka.
4. Mekanisme Pelaporan yang Aman: Membangun mekanisme pelaporan yang aman dan anonim bagi pekerja migran untuk melaporkan pelanggaran atau masalah yang mereka hadapi. Hal ini penting untuk memberikan rasa aman bagi pekerja dalam melaporkan kasus-kasus eksploitasi tanpa takut akan repercusi.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Jurnal

- (Septino et al., 2025)Nuraeny, H. (2015). Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan Modern dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (Migrant Workers, a New Modern-Day Form of Slavery, is a Part of Human Trafficking Crime). *Jurnal Hukum & Peradilan*, 4(3), 501-518. <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/59/70>
- Safitri, D., & Wibisono, A. A. (2023). Keamanan Manusia Pekerja Migran Indonesia: Ketidakeamanan dan Perlindungannya. *Intermestic: Journal of International Studies*, 7(2), 741-769. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v7n2.17>
- Sauri, M. S. (2023). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan Produk Keuangan Syariah. *NOMISMA : Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Manajemen*, 1(1), 141.
- Septino, M. R. N., Zega, A. V., & Riskiana, E. (2025). Peran Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kasus Meriance Kabu dalam Memperjuangkan Keadilan. 2(4), 258-270.
- Wahyunengseh, R. D. (2011). Membangun kepercayaan publik melalui kebijakan sosial inklusif. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 15(1), 29-40. <https://journal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10923/8164>
- Yusitarani, S. (2020). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Tenaga Migran Korban Perdagangan Manusia Oleh Pemerintah Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 24-37. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.24-37>
- (Yusitarani, 2020)Nuraeny, H. (2015). Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan Modern dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (Migrant Workers, a New Modern-Day Form of Slavery, is a Part of Human Trafficking Crime). *Jurnal Hukum & Peradilan*, 4(3), 501-518. <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/59/70>
- Safitri, D., & Wibisono, A. A. (2023). Keamanan Manusia Pekerja Migran Indonesia:

- Ketidakamanan dan Perlindungannya. *Intermestic: Journal of International Studies*, 7(2), 741–769. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v7n2.17>
- Sauri, M. S. (2023). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan Produk 141.
- Septino, M. R. N., Zega, A. V., & Riskiana, E. (2025). *Peran Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kasus Meriance Kabu dalam Memperjuangkan Keadilan*. 2(4), 258–270.
- Wahyunengseh, R. D. (2011). Membangun kepercayaan publik melalui kebijakan sosial inklusif. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 15(1), 29–40. <https://journal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10923/8164>
- Yusitarani, S. (2020). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Tenaga Migran Korban Perdagangan Manusia Oleh Pemerintah Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 24–37. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.24-37>
- (Sauri, 2023)(Safitri & Wibisono, 2023)(Wahyunengseh, 2011)(Nuraeny, 2015)
- Artikel Prosiding**
- (Nuraeny, 2015)Nuraeny, H. (2015). Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan Modern dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (Migrant Workers, a New Modern-Day Form of Slavery, is a Part of Human Trafficking Crime). *Jurnal Hukum & Peradilan*, 4(3), 501–518. <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/59/70>
- Safitri, D., & Wibisono, A. A. (2023). Keamanan Manusia Pekerja Migran Indonesia: Ketidakamanan dan Perlindungannya. *Intermestic: Journal of International Studies*, 7(2), 741–769. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v7n2.17>
- Sauri, M. S. (2023). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan Produk Keuangan Syariah. *NOMISMA : Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Manajemen*, 1(1), 141.
- Septino, M. R. N., Zega, A. V., & Riskiana, E. (2025). *Peran Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kasus Meriance Kabu dalam Memperjuangkan Keadilan*. 2(4), 258–270.
- Wahyunengseh, R. D. (2011). Membangun kepercayaan publik melalui kebijakan sosial inklusif. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 15(1), 29–40. <https://journal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10923/8164>
- Yusitarani, S. (2020). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Tenaga Migran Korban Perdagangan Manusia Oleh Pemerintah Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 24–37. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.24-37>